



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
KELURAHAN KAPPUNA**

Jl. Jend. Ahmad Yani Telp. (0473) 22144 Kode Pos 92961

**KEPUTUSAN LURAH KAPPUNA
NOMOR : 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Lurah Kappuna Kabupaten Luwu Utara tentang penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor : 148/253/KKPN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 148/253/KKPN yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 24 Agustus 2021



LAMPIRAN I

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KELURAHAN KAPPUNA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERAGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biodata Elektronik ASN (DATABASE)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
4	Daftar nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
5	Data Rekam medis PNS	1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No 269/MENKES/PER/IIII/2 008 Pasal 12 dan 13	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel

6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UUD NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. UUD NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
8	Daftar username dan Password website SKPD	UU No. 11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
9	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
11	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
12	Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
13	Kode akses elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel

14	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Dikualifikasi/ Semua SKPD/Kec/Kel
----	-------------------------------------	--	---	---	-----------------------------------

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 24 Agustus 2021



LURAH KAPPUNA
MABRIYADI, S.AN
197850162007011011

IRAN II
etapan daftar informasi yang dikecualikan

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Nomor : 148/253/KKPN

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kappuna yang bertanda Tangan Dibawah ini :

1. ANDRIYADI, S. AN, Lurah Kappuna
2. AHMADI, S.Sos, Sekertaris Lurah
3. ASBANIAH, S.Sos, Kasi Pelayanan Umum
4. HENDRA NUSA WANGKA, S.Sos, Kasi Pemerintahan
5. UMI KALSUM, S.Sos, Kasi Pembangunan & Kesra

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan terdapat 14 informasi yang dinyatakan dikecualikan

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 24 Agustus 2021

Tim Penguji :

1. ANDRIYADI, S. AN, Lurah Kappuna
2. AHMADI, S.Sos, Sekertaris Lurah
3. ASBANIAH, S. Sos, Kasi Pelayanan Umum
4. HENDRA NUSA WANGKA, S.Sos, Kasi Pemerintahan
5. UMI KALSUM, S.Sos, Kasi Pembangunan & Kesra

